

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi ancaman bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Peringkat Indonesia yang masih tinggi dalam Indeks Korupsi di Asia mengundang banyak khalayak untuk mempertanyakan efektivitas pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Berdasarkan data dari Transparency Internasional (TI), Indonesia merupakan negara di Asia yang perilaku korupsinya masih menonjol, dan terus menjadi sorotan. Sudah sekian kali TI kembali meluncurkan barometer korupsi global, dan sekian kali pula Indonesia masuk dalam jajaran negara yang mendapatkan angka "merah" untuk korupsinya (<http://www.antaranews.com/berita/1258561441/korupsi-di-indonesia-masih-menonjol-di-asia> diunduh tanggal 8 Agustus 2011). Data menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dari tujuh negara di Asia yang tingkat korupsi dan nepotismenya besar, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, memiliki angka rata-rata tertinggi. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan nilai kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2010 mencapai Rp 3,6 triliun. (<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78626/Nilai-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Rp-36-Triliun> diunduh tanggal 8 Agustus 2011)

Salah satu elemen penyimpangan yang terjadi adalah pada bidang konstruksi. Data menunjukkan bahwa kebocoran biaya proyek pembangunan di bidang konstruksi dan investasi dengan anggaran negara disinyalir mencapai Rp 76,7 triliun per tahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) rata-rata per tahun mencapai Rp 330 triliun, lalu untuk anggaran proyek konstruksi dan investasi mencapai Rp 130 triliun, maka disinyalir terjadi kebocoran sebesar 59 persen.

(<http://www.bpkp.go.id/berita/read/662/4690/Kebocoran-Dana-Proyek-Bidang-Konstruksi-dan-Investasi-Capai-Rp-76-7-Triliun.bpkp> diunduh tanggal 8 Agustus 2011)

Banyaknya penyimpangan yang masih terjadi mendorong berbagai pihak untuk kembali mengkaji pentingnya penerapan kode etik profesi insinyur didalam setiap pekerjaan konstruksi. Hal ini dianggap penting karena penyimpangan tersebut merupakan bentuk cerminan pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional. Dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi insinyur (Harris, 1995).

Salah satu pasal dalam *Fundamental Canon* mengemukakan bahwa setiap insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk menegakkan dan meningkatkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi teknik dan harus bertindak secara intoleransi terhadap penyuapan, penipuan dan korupsi. Dengan adanya kode etik profesi, maka akan ada semacam aturan yang bisa dijadikan

guideline untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Disamping itu kode etik profesi ini juga bisa dipakai untuk membangun *image* dan menjaga integritas maupun reputasi profesi, serta memberikan gambaran tentang keterkaitan hubungan antara pemberi dengan pengguna jasa keprofesian. Ketika kode etik profesi ini menjadi acuan oleh setiap insinyur, bukan tidak mungkin penyimpangan didalam pekerjaan konstruksi menjadi tidak ada.

Pentingnya penerapan kode etik profesi insinyur di Indonesia sejatinya telah banyak diterapkan oleh berbagai instansi khususnya instansi pemerintah. Said Didu mengemukakan saat ini sudah ada 10 lembaga kementerian dan 30 perusahaan besar yang menandatangani tekad menegakkan profesi insinyur dengan cara tidak menggarap proyek-proyek berbau korupsi. Lembaga yang bertekad menegakkan etika profesi insinyur itu diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Jasa Marga, Tbk, dan PT. Telkom, Tbk. (<http://www.koruptorindonesia.com/2011/07/persatuan-insinyur-tolak-suap-korupsi-proyek/> diunduh tanggal 8 Agustus 2011).

Sayangnya, Kabupaten Ngawi belum mempunyai aturan untuk menegakkan etika profesi insinyur dalam proses pembangunan konstruksi di wilayahnya. Berbagai penyimpangan yang terjadi di bidang konstruksi seringkali menjadi masalah pelik yang tidak terselesaikan. Salah satunya adalah dari Data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2009 yang berujung pada pengembalian keuangan ke kas daerah.

Penyimpangan bidang konstruksi paling populer di Kabupaten Ngawi hingga sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terjadi pada pembangunan ruang poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Proyek bernilai Rp.9.029.026.000,- tersebut juga tak lepas dari penyimpangan yang mencerminkan rendahnya penerapan etika didalam proses pelaksanaannya. Data Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Timur menyebutkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp.139.681.491,65,- berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang dikerjakan oleh Pelaksana dari Surabaya sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jawa Timur Nomor 115/S/XVIII.JATIM/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. Sementara itu, perkara *mark up* proyek poliklinik RSUD tersebut mengundang perhatian serius Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang menyebutkan bahwa kerugian negara menyentuh angka Rp. 1 miliar. Dugaan tersebut berujung pada ditetapkannya tiga tersangka yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek, yakni : kuasa direktur pelaksana, petugas RSUD dr. Soeroto yang bertanggungjawab dilapangan dan direktur konsultan pengawas (Kasus korupsi RSUD siap sidang-Jawa Pos, 22 Oktober 2011)

Dari data penyimpangan diatas terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi mengindikasikan rendahnya penerapan kode etik insinyur didalamnya. Profesionalisme kerja seorang insinyur

yang semestinya menjadi pedoman utama dalam pekerjaan sebuah konstruksi tidak ditegakkan dalam pekerjaan pembangunan poliklinik.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya penerapan kode etik insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi “

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor berpengaruh terhadap rendahnya penerapan kode etik insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

2. Manfaat penelitian

1) Manfaat Akademis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu teknik sipil utamanya yang terkait dengan kajian penerapan kode etik profesi insinyur.

2) Manfaat Praktis

a. Dengan mengetahui faktor berpengaruh terhadap rendahnya penerapan kode etik profesi insinyur dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya minimalisasi faktor-faktor berpengaruh terhadap rendahnya penerapan kode etik profesi insinyur dalam pekerjaan konstruksi di Kabupaten Ngawi.

- b. Dengan mengetahui faktor berpengaruh terhadap rendahnya penerapan kode etik profesi insinyur dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi yang dilandasi oleh kode etik profesi insinyur.

D. Kerangka Teoritik

1. Konsep kode etik profesi insinyur

Kode etik merupakan norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang

kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil *Self Regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Sebagai sebuah profesi, insinyur juga memiliki kode etik profesi. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga standar profesionalisme mereka. Kode etik profesi insinyur dikenal dengan nama etika enjiniring. Fleddermann (2006 : 2) mengemukakan bahwa etika enjiniring adalah aturan dan standar yang mengatur arah para insinyur dalam peran mereka sebagai profesional. Lebih lanjut, Fleddermann menjelaskan bahwa didalam etika enjiniring tidak hanya memasukkan definisi etika secara umum tetapi menerapkan definisi tersebut secara lebih spesifik ke berbagai situasi yang melibatkan insinyur dalam kehidupan profesional mereka. Jadi, etika enjiniring merupakan sebuah bentuk

filosofi yang mengindikasikan cara bagi para insinyur untuk mengarahkan diri mereka dalam kapasitas profesional mereka.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan etika profesi

Penerapan etika profesi didalam pekerjaan konstruksi memang tidak bisa terelakkan sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersih. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya penerapan etika profesi memang tidak bisa terlepas dari peran pekerjaan konstruksi dalam pembangunan negara. Dalam penelitian ini, sedikitnya terdapat empat faktor berpengaruh pada rendahnya penerapan etika profesi pada pekerjaan konstruksi. Keempat elemen dilihat dari sisi internal dan eksternal dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Tak bisa dipungkiri bahwa didalam sebuah pekerjaan konstruksi tidak hanya menyangkut sisi profesionalisme secara teknis, akan tetapi juga memiliki aspek non teknis lainnya. Keempat faktor pengaruh tersebut antara lain : faktor komitmen pelaksana, sumber daya manusia (SDM), kebijakan, dan faktor konflik kepentingan.

Faktor komitmen pelaksana menjadi faktor pengaruh penting karena menjadi awal dari sebuah pekerjaan konstruksi. Secara organisasi, komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Sedangkan secara individual, komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang.

Dari segi faktor sumber daya manusia (SDM), Fleddermann (2006 : 27-28) menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerapan kode etik profesi

didalam pekerjaan konstruksi adalah karena praktisi insinyur yang menjadi anggota organisasi profesional relatif sedikit sehingga mereka tidak merasa perlunya diatur-atu secara paksa oleh kode etik mereka.

Selain hal tersebut diatas, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap rendahnya penerapan etika profesi merupakan faktor kebijakan pemerintah. Faktor ini menjadi penting karena tanpa adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah mengenai kode etik profesi insinyur, maka implementasi kode etik insinyur di Indonesia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang bisa mengikat para insinyur.

Faktor berpengaruh lainnya adalah konflik kepentingan. Pentingnya faktor ini dikarenakan didalam pekerjaan konstruksi seringkali menimbulkan pertentangan antara moralitas pribadi dan moralitas perusahaan. Menurut Fleddermann (2006 : 4-5), etika profesi sering melibatkan pilihan-pilihan pada tingkat organisasi daripada tingkat pribadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk dapat memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan kode etik insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Dalam penelitian ini yang diamati adalah orang yaitu pelaksana pekerjaan pembangunan

ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi dan kegiatan yang dilakukannya yaitu pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan kode etik insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

2. Lokasi penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan tertentu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah bahwa pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi merupakan pekerjaan konstruksi gedung kantor dengan nilai terbesar pada saat itu dan memiliki penyimpangan bidang konstruksi paling populer di Kabupaten Ngawi hingga sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

3. Jenis data dan sumber data

3.1. Jenis data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang digali dan diolah yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan

kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada berupa keadaan, proses, kejadian, atau peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan data kuantitatif berupa jumlah atau angka yang dapat memperjelas penyajian data kualitatif.

3.2. Penentuan informan

Untuk mendapatkan kualitas data yang memadai, perlu adanya informan atau narasumber yang terlibat dalam pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini, informan yang akan diteliti adalah petugas RSUD dr. Soeroto yang bertanggungjawab dilapangan, pelaksana, salah satu peserta lelang lainnya dan pengawas dilapangan.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas RSUD dr. Soeroto yang bertanggungjawab dilapangan dan pelaksana yang dikategorikan paling banyak mengetahui dan menguasai informasi mengenai pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Informan ini pula yang membuka jalan bagi peneliti untuk menemukan informan lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan lainnya ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yakni penggalan data melalui wawancara mendalam dari suatu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai titik jenuh karena informan tersebut sudah tidak lagi memberikan informasi baru lagi mengenai penerapan kode etik insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto

Kabupaten Ngawi. Artinya informan tersebut ‘ceritanya’ sama saja dengan informan-informan sebelumnya.

3.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara terhadap petugas RSUD dr. Soeroto yang bertanggungjawab dilapangan, pelaksana, pengawas dilapangan, salah satu peserta lelang lainnya dan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung oleh peneliti. Penggunaan data ini dilakukan untuk melengkapi informasi dan *cross check* data dari pengambilan data primer. Data ini berupa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Jawa Timur, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Ngawi atas pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi dan data profil RSUD dr. Soeroto.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode :

1) Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara memiliki fungsi untuk menggali informasi dan berbagai wacana dari informan yang dianggap representatif didalam penerapan kode etik profesi insinyur dalam pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara bebas yang bertujuan untuk mencegah hal yang tidak tertampung dalam wawancara terstruktur.

2) Observasi

Teknik ini bertujuan untuk melihat kenyataan di lapangan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi observasi partisipasi pasif yaitu peneliti menempatkan diri sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam penerapan kode etik profesi insinyur. Teknik ini diambil dan perlu dilakukan oleh peneliti untuk mengamati seberapa rendah penerapan kode etik profesi insinyur dalam pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya guna mengungkapkan fenomena yang sedang terjadi dan membantu peneliti untuk melakukan analisis data secara obyektif.

3) Dokumentasi.

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari berbagai literatur atau dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pemakaian metode ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang berasal dari dokumen-dokumen penting yang relevan dengan penelitian, yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Jawa Timur dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Ngawi atas pembangunan ruang poliklinik RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

5. Teknik analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menjadi lebih berguna sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data terdiri dari 3 (tiga) tahapan sesuai dengan tahapan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009 : 92-99) yaitu :

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam tahap ini, data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi dimaksudkan untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang didapat dari data lapangan tersebut. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lapangan diberi kode kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema. Tema ini meliputi tempat, waktu, dan cara pandang

terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Untuk data hasil wawancara maupun observasi, peneliti memberikan kode atau catatan kecil terhadap data tersebut sehingga akan memudahkan dalam mengelompokkannya. Disamping itu, data tersebut juga akan diberikan pemaknaan ataupun saran sebagai langkah analisis selanjutnya. Sedangkan data dokumentasi, peneliti akan memberikan kode pada data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menghubungkan data tersebut dengan hasil wawancara maupun observasi serta membuat ringkasan untuk lebih memaknai data tersebut.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun diagram. Tujuan dari pen-*display*-an data ini adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

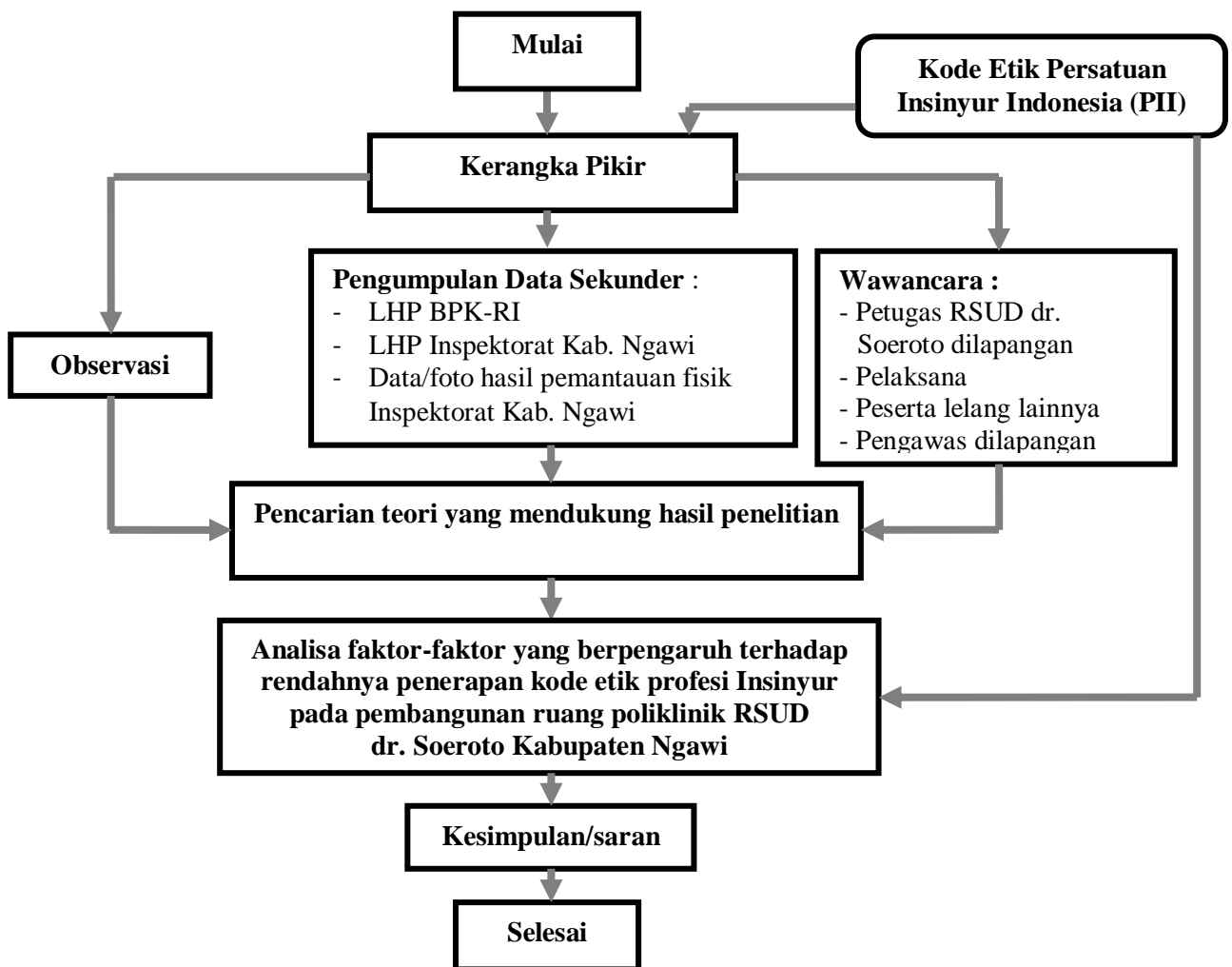
3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan akan selalu difokuskan untuk menjawab rumusan masalah. Dari berbagai data yang

diperoleh di lapangan akan ditarik suatu kesimpulan sebagai rangkaian fenomena untuk menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat hubungan antar data, informasi yang bersifat aktual atau menarik serta informasi dari informan terkait permasalahan penelitian.

F. Alur Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu rangkaian langkah kerja kegiatan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan penelitian. Sebagai ilustrasi jalannya penelitian secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Alur Penelitian

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai dari proses pembentukan kerangka pikir penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembentukan kerangka pikir penelitian dilakukan sebagai *guideline* untuk mendapatkan data-data penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder berupa LHP BPK RI, LHP Inspektorat, dan data foto hasil pemantauan fisik Inspektorat Kabupaten Ngawi. Setelah data penelitian terkumpul dan direduksi berdasar tema, peneliti mencari teori-teori yang relevan dan mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian berupa data-data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori. Analisis dilakukan untuk mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya penerapan kode etik profesi insinyur pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi. Hasil analisis data kemudian mengerucut pada kesimpulan penelitian. Peneliti juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Kode Etik Profesi Insinyur dalam Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
 - 1. Kode etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

2. Jenis penyimpangan kode etik pada pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
3. Analisis penyimpangan pekerjaan pembangunan ruang poliklinik RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi berdasarkan Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

B. Pembahasan

1. Komitmen pelaksana
2. Sumber daya manusia (SDM)
3. Faktor kebijakan
4. Konflik kepentingan
 - 4.1. Munculnya konflik kepentingan
 - 4.2. Konflik kepentingan sebagai faktor pengaruh

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Rekomendasi